

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

(UPTD KPHP MERATUS)

PERIODE II TAHUN 2024



DISUSUN OLEH :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Trinaldi Setiawan | (2004016177) |
| 2. Hendarlan Ramadhani | (2004016160) |
| 3. Luis Fernando | (2004016100) |
| 4. Cindy Zenada | (2004016026) |
| 5. Monica Priscilia | (2004016247) |

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
(UPTD KPHP MERATUS)

TAHUN 2024

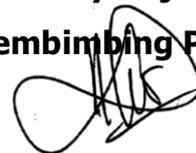
DISUSUN OLEH :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM
1	TRINALDY SETIAWAN	2004016177
2	HENDARLAN RAMADHANI	2004016160
3	LUIS FERNANDO	2004016100
4	CINDY ZENADA	2004016026
5	MONICA PRISCILIA	2004016247

Samarinda, 17 Agustus 2024

Mengetahui/Mengesahkan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Menyetujui
Pembimbing PKL,



Prof. Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P
NIP. 197504282001122001

Prof. Dr. Karyati, S.Hut., M.P
NIP 197304091999032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat terselasaikan dengan baik guna memenuhi syarat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

Kami ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada koordinator Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam proses penyusunan laporan dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan laporan. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis pihak yang terjun langsung melakukan praktik kerja, tetapi pihak lain yang membacanya.

Samarinda, 20 Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Hasil yang Diharapkan	3
II. GAMBARAN UMUM LOKASI.....	4
A. Deskripsi UPTD KPHP Meratus	4
B. Visi dan Misi UPTD KPHP MERATUS	6
C. Tujuan Pengelolaan	7
D. Sasaran	8
III. REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	11
A. Ruang Lingkup Kerja UPTD KPHP Meratus	11
B. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat.....	21
C. Monitoring Lahan Kegiatan Hutan Rakyat.....	22
D. Identifikasi Pembuatan Hutan Rakyat dengan Drone di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara.....	23
E. Patroli Pengamanan, Kebakaran Hutan dan Lahan.....	24
F. Kegiatan Bimtek Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu UPTD KPHP Meratus	25
G. Menghadiri Kegiatan MPA	26
H. Pengecekan Bibit Hutan Rakyat dan Madu Kelulut	27

I. Pengecekan Lahan dan Bibit Hutan Rakyat	28
J. Pembuatan Laporan dan Pemetaan Hasil Drone	29
IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan PKL di UPTD KPHP Meratus	17
Tabel 2. Matriks realisasi kegiatan.....	18
Tabel 3. Kegiatan di UPTD KPHP Meratus	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta wilayah kerja UPTD KPHP Meratus.....	5
Gambar 3. 1 Rapat pelaksanaan hutan rakyat	20
Gambar 3. 2 Monitoring lahan hutan rakyat	21
Gambar 3. 3 Identifikasi hutan rakyat menggunakan drone	22
Gambar 3. 4 Patroli dan pengamanan kebakaran hutan dan lahan.....	23
Gambar 3. 5 Kegiatan bimtek kelompok HHBK KPHP Meratus	24
Gambar 3. 6 Menghadiri kegiatan Masyarakat Peduli Api	25
Gambar 3. 7 Mengecek bibit hutan rakyat dan madu kelulut	26
Gambar 3. 8 Mengecek bibit unggul untuk hutan rakyat	27
Gambar 3. 9 Pembuatan laporan hasil drone.....	28

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan suatu institusi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan praktis, dan kepekaan sosial mahasiswa, yang nantinya akan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, menciptakan individu yang tidak hanya terampil secara akademis atau profesional, tetapi juga peka terhadap kebutuhan dan dinamika sosial di sekitar mereka. Dalam era globalisasi ini, perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan kompleks yang terus berkembang. Lembaga ini menjadi tempat dimana pemikiran kritis, inovasi dan penelitian digalakkan, menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi intelektual. Berdasarkan dari penjelasan di atas diperlukan suatu kegiatan yang terencana untuk membentuk dan melatih mahasiswa menjadi intelektual muda yang berkualitas dan tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat, sehingga Universitas Mulawarman khususnya Fakultas Kehutanan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berusaha membentuk dan melatih mahasiswanya untuk siap terjun ke dunia kerja.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan dalam praktiknya. Kegiatan ini dapat menambah pengalaman mahasiswa khususnya di Program Studi Sarjana 1 (Prodi S1) Kehutanan Universitas.

Mulawarman dan memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku perkuliahan kelak. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) persaingan di dunia kerja juga semakin menjadi ketat karena individu-individu telah memiliki skill yang mumpuni yang dibutuhkan sebagai bekal untuk menghadapi persaingan tersebut. Untuk mengantisipasi persaingan

yang ada, mahasiswa Universitas Mulawarman dituntut mempersiapkan diri dengan menimba pengalaman melalui kegiatan PKL, agar tidak hanya matang dari segi teori, akan tetapi juga siap dalam praktiknya

Melalui kegiatan PKL ini Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dapat belajar bagaimana mengatasi permasalahan yang berbeda pada setiap perusahaan, karena pada industri kerja akan menjadi hal yang kompleks dimana para mahasiswa akan dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda dengan permasalahan yang rumit. PKL ini juga akan menciptakan mahasiswa yang memiliki mental yang kuat jika menemui masalah serupa karena sudah pernah merasakan tekanannya. Semua ilmu yang didapatkan selama PKL, akan membuat mahasiswa menjadi lebih baik karena pengalaman dan kepercayaan diri untuk memasuki dunia kerja telah diperoleh. Kegiatan PKL juga berguna untuk Universitas Mulawarman sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum yang telah ada di Universitas Mulawarman dari para mahasiswa yang telah melaksanakan PKL. Pada kegiatan PKL ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan PKL di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus, merupakan dinas kehutanan yang bergerak dalam Pengelolaan Hutan dan Penanggulangan kebakaran Kawasan Hutan dan Lahan yang berada di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Mengetahui dan memahami sistem pengelolaan hutan di wilayah KPHP Meratus.
2. Memperdalam pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang bersifat praktis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi kegiatan penanaman, pembibitan dan pengelolaan hutan.
3. Memahami interaksi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan.
4. Memenuhi syarat pendidikan di Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

C. Hasil yang Diharapkan

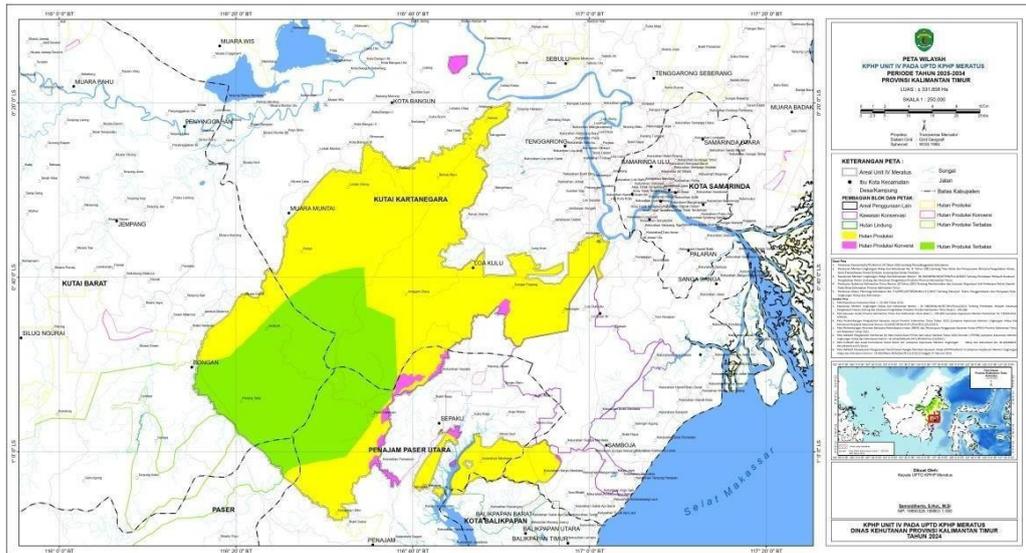
Hasil yang di harapkan dalam hal ini yaitu, mahasiswa mampu memahami dan mengerti pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada di KPHP Meratus dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak.

II. GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Deskripsi UPTD KPHP Meratus

KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus merupakan salah satu KPH lintas kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur, berada di lintas 5 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu KPH dari 120 KPH yang akan di dorong untuk menjadi KPH yang beroperasi. Penetapan Wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus sebagai KPH Model oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor: SK 674/Menhut-II/2011, tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Meratus lintas 5 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kota Bangun (6 Desa), Loa Janan (2 Desa), Loa Kulu (5 Desa), Muara Muntai (2 Desa), Muara Wis (2 Desa), Samboja (2 Desa), Sebulu (4 Desa) dan Muara Kaman (2 Desa), Kabupaten Kutai Barat dengan kecamatan Bongan (4 Desa), Kabupaten Paser dengan kecamatan Longkali (1 Desa), Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kecamatan Penajam (2 Desa) dan Sepaku (14 Desa) dan Kota Balikpapan dengan kecamatan Balikpapan Barat (1 Desa) dan Balikpapan Utara (1 Desa) Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 368.011 ha (Alamsyah, 2018).

Berdasarkan dari SK. 554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan. kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 560/MENLHK/SETJEN-/PLA.0/2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga luas KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus sesuai Keputusan Menteri Kehutanan terhadap pemutakhiran peta SK.718/Menhut-II/2014 menjadi seluas 331.858 ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 211.597 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 113.622,58 ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 42.791 ha setelah overlay terhadap peta SK.718/Menhut-II/2014. Gambar 2.1 menampilkan peta wilayah kerja UPTD KPHP Meratus.



Gambar 2. 1 Peta wilayah kerja UPTD KPHP Meratus

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan hutan diatas, KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus perlu melaksanakan tata hutan dan rencana pengelolaan yang merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Visi dan Misi UPTD KPHP MERATUS

1. Visi

Pengelolaan hutan di KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus merupakan bagian dari pengelolaan hutan nasional. Oleh karena itu perumusan sinyal perlu mengacu pada pengelolaan hutan nasional juga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan

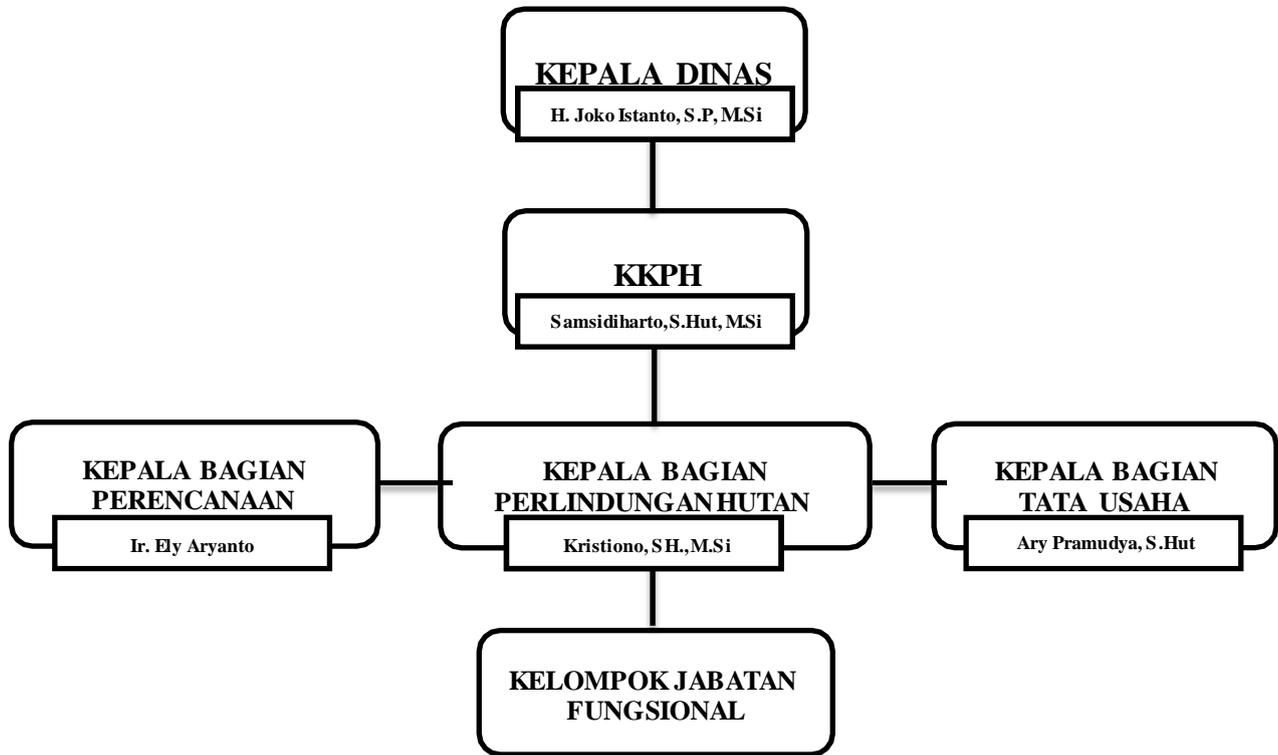
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu: (1) Pemantapan kawasan hutan; (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya ukung DAS; (3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; (4) onservasi keanekaragaman hayati; (5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri ehutanan; dan (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

2. Misi

Untuk mencapai visinya, KPHP meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus memiliki misi sebagai berikut :

- a) Menguatkan kapasitas organisasi KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus.
- b) Memantapkan Kawasan di wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus.
- c) Memberdayakan desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan
- d) Melindungi keragaman hayati yang ada dalam hutan
- e) Melindungi tanah dan air.

Gambar 2.2 menampilkan struktur organisasi UPTD KPHP Meratus.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD KPHP Meratus.

B. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan Hutan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus ini bertujuan dengan memanfaatkan sumberdaya secara lestari sesuai fungsinya dengan memperhatikan aspirasi peran dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat. Dokumen RPHJP pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang memuat aspek penyelenggaraan, pengelolaan hutan dalam kurun jangka Panjang (10 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Beberapa tujuan pengelolaan yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatkan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus supaya lebih mandiri.
2. Mewujudkan manajemen pengelolaan seluruh wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus yang efisien, efektif, dan
3. Mewujudkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus.
4. Mewujudkan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
5. Mewujudkan sumber-sumber ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang bermuatan lokal untuk kepentingan nasional.
6. Mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan optimal.

C. Sasaran

Sasaran pengelolaan wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus yang sesuai dengan kondisi tapak, visi dan misi pembangunan kehutanan baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan secara lestari sebagai berikut:

1. Tertatanya seluruh wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus, mulai dari Batas Luar Kawasan, Blok, Petak dan Anak Petak, serta teridentifikasinya seluruh bagian tersebut secara detail dalam bentuk data spasial maupun tabular/numerik. Terbentuknya pengembangan data base meliputi penyiapan perangkat database (laptop+LAN); pelatihan operator database; pembuatan database (biofisik, sosekbud, potensi HH dan lain-lain), sinkronisasi data dan pelaporan; pembuatan perangkat sistem informasi teknologi database dalam manajemen pengelolaan KPH.
2. Terlaksananya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah kelola KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus melalui kegiatan usaha pengembangan HHBK unggulan (rotan, bambu, madu, damar, sarang burung wallet dan lain-lain).
3. Terlaksananya pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah kelola KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus sesuai dengan sediaan tegakan dengan berbagai kelas diameter 20-40 cm, 40 cm up serta 50 cm up dengan rata-rata 33,20 M³/ha, 29,97 m³/ha dan 13,47 M³/ha.
4. Terlaksananya Inventarisasi Wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus baik kondisi dan potensi yang meliputi biofisik, sosial

ekonomi dan budaya masyarakat serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan. Inventarisasi ini nantinya akan dengan mudah mengelompokkan potensi potensi yang ada serta mampu sebagai sumber ekonomi di wilayah KPHP.

5. Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan; pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pada areal izin

III. REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kerja UPTD KPHP Meratus

Ruang lingkup dari Rencana Pengelolaan KPHP Meratus (Unit IV)

Pada UPTDKPHP Meratus ini meliputi:

1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan
Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan sangat penting dalam rangka mendukung rencana kegiatan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus yang baik, benar dan terpercaya. Inventarisasi hutan dilakukan pada dasarnya terdiri dari dua aspek utama guna mendapatkan data dan informasi. Sementara tata batas fungsi hutan sangat penting untuk kepastian hukum akan kawasan tersebut, sehingga dapat meminimalisir desakan akan lahan oleh masyarakat.
2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Berdasarkan Wilayah Tertentu pada Wilayah KPHP Meratus (Unit IV)
Pada UPTD KPHP Meratus seluas 331.858 ha. Adapun rencana pemanfaatan wilayah tertentu meliputi: melakukan studi kelayakan, menyusun rencana pengelolaan, rencana bisnis terhadap pemanfaatan, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan, dan melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Pemberdayaan Masyarakat yaitu untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kesejahteraan.
4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin. Pembinaan, Pemantauan Pemanfaatan hutan dilakukan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap para pemegang izin di wilayah kerja KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus dilakukan secara intensif. Pembinaan secara keseluruhan mencakup; pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang ijin dilaksanakan dalam

rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan sesuai dengan kaidahkaidah kelestarian (aspek ekologi).

5. Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin Berdasarkan Wilayah Tertentu KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus terdapat Blok Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK seluas 5.310,22 ha dan Blok Inti seluas 1.381,35 dapat dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 200 ha/tahun sehingga untuk RPHJP berkelanjutan akan terealisasi 2.000 ha. Penyelenggaraan kegiatan RHL dilakukan dengan memasukkan unsur unsur perencanaan, pengorganisasian / kelembagaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dan pengendalian.
6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin. KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang izin, berupa arahan kebijakan kepada izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, sosialisasi peraturan pengelolaan hutan, bimbingan dan pertimbangan teknis terhadap izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Peningkatan kapasitas pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan Mendorong dan mendampingi pelaksanaan sertifikasi PHPL pada izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
7. Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari, Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dan sumber daya hutan, Melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan Merencanakan alokasi kawasan lindung di dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan, Menilai

dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung, Menyusun masterplan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan karakteristiknya, Pengelolaan kawasan lindung secara partisipatif dan kolaboratif dengan berbagai pihak dan Menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH.

8. Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin Sinkronisasi lebih diupayakan untuk menyasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan di dalam kawasan yang dikelola oleh masing-masing pemilik izin agar tidak saling tumpang tindih dan saling klaim. KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus mempunyai tugas menginternalisasikan program-program pembangunan daerah dalam pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketiga tugas-fungsi tersebut, terbangunnya sistem koordinasi menjadi kunci atau prakondisi bagi keberhasilan tugas-tugas pokok tersebut.
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* terkait kegiatan koordinasi dan sinerji dengan instansi dan stakeholder yang terkait dengan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus untukmensinergikan, mengintegrasikan dan mengelaborasi program dan kegiatan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus, sekaligus mengkomunikasikan keberadaan, tugas, pokok dan fungsi dari KPHP Meratus(Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus, karena itu perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut: identifikasi dan inventarisasi stakeholder yang melakukan kegiatan di wilayah KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus, integrasi program dan kegiatan dengan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, integrasi kegiatan dengan LSM dan program-program lain yang ada di wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus, pengembangan program bersama, monitoring, evaluasi, pembelajaran bersama dan membangun jaringan dengan *stakeholder* yang terkait.

10. Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka pengelolaan hutan perlu pengembangan aparatur dan sarana prasarana ini yang mencakup kegiatan kebutuhan dan pengembangan aparatur. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur/personil maka perlu dilakukan kajian/analisis kesesuaian antara beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan. Disamping pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur, pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikanteknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas.
11. Penyediaan pendanaan dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi wilayah KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus, diperlukan dukungan pendanaan yang kuat. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD ataupun dukungan dana lainnya yang dimungkinkan yang diperoleh dengan menjalin kerjasama serta kemitraan dengan berbagai pihak.
12. Pengembangan database yang lengkap sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus dari tingkat KPH hingga unit terkecil/tapak. Selain itu database juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHP Meratus (Unit IV) Pada UPTD KPHP Meratus. Kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain: pelatihan SDM pengelola database, penyiapan perangkat database, penyusunan dan pengelolaan tabel database, dan pembuatan website KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus.
13. Rencana rasionalisasi wilayah kelola Pengelolaan KPHP Meratus (UnitIV) pada UPTD KPHP Meratus tidak ada

perubahan fungsi kawasan yang berarti, apabila dalam jangka waktu 10 tahun kedepan terdapat perubahan, maka KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus akan mendukung dan mendorong terhadap izin-izin yang ada dalam Kawasan Hutan untuk menyesuaikannya.

14. Review rencana pengelolaan tingkat perkembangan dan keberhasilan suatu rencana pengelolaan diketahui melalui review pelaksanaan program dalam kurun waktu minimal 5 tahun sekali serta menganalisis perkembangan dan keberhasilan pengelolaan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: Peninjauan Substansi, Implementasi, Relevansi dan Adaptabilitas.
15. Pengembangan investasi ini bukan hanya terbatas pada produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, namun termasuk juga jasa lingkungan dan lain-lain. Pengembangan investasi akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekosistem dan tetap memperhatikan tujuan utama pembangunan KPH. Pengembangan investasi diarahkan agar KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus yang mandiri dan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: pengembangan tanaman lokal (dari jenis Meranti yang sudah ada maupun jenis-jenis lain yang cocok diwilayah tersebut) sehingga wilayah tertentu dapat dijadikan contoh pembudidayaan tanaman lokal yang nantinya dapat dikelola dengan memberdayakan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan dalam sistem pengelolaan hutan secara lestari dengan menggandeng pihak investor yang mau menanamkan modalnya dibidang kehutanan, setelah pengelola KPHP Meratus (Unit IV) pada UPTD KPHP Meratus melakukan identifikasi dan inventarisasi. Tabel 3.1 menjelaskan tentang kegiatan PKL di UPTD KPHP Meratus, sedangkan matriks realisasi kegiatan di tampilkan pada tabel 3.2 dan lanjutannya pada tabel 3.3. Kegiatan seksi-seksi UPTD KPHP Meratus di tunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Kegiatan PKL di UPTD KPHP Meratus

No.	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat
2	Survei Lahan kegiatan Hutan Rakyat
3	Monitoring Lahan Hutan Rakyat
4	Identifikasi Pembuatan Hutan Rakyat dengan Drone di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
5	Patroli Pengamanan Hutan dan Kebakaran
6	Menghadiri Kegiatan Bimtek Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu UPTD KPHP Meratus
7	Menghadiri kegiatan MPA
8	Pengecekan Bibit Hutan Rakyat dan Lebah Madu Kelulut
9	Pengecekan Lahan dan Penandaan Bibit dari Kelompok Tani Hutan (KTH)
10	Pembuatan Laporan dan Pemetaan Hasil Drone Pantai Lango

Tabel 3.2. Matriks Realisasi Kegiatan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Prosedur Pelaksanaan	Tanggal pelaksanaan	Capaian
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat	Rapat Pelaksanaan Survei Kegiatan Hutan Rakyat	UPTD KPHP Meratus	Diskusi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat	25 Juni 2024	Informasi Mengenai Hutan Rakyat
2	Monitoring Lahan Kegiatan Hutan rakyat	Survei Lokasi dan Koordinasi Kepada Staff Kelurahan	Kab. PPU <ul style="list-style-type: none"> • Kel. Maridan • Desa Argo Mulyo • Desa Wono Sari 	Melakukan Koordinasi Kepada Staff Kelurahan Titik Lokasi Hutan Rakyat	26 Juni - 01 Juli 2024	Mengetahui titik Lokasi Hutan Rakyat di kec. Sepaku yang berlokasi di beberapa desa/kelurahan
3	Identifikasi Pembuatan Hutan Rakyat dengan Drone di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara	Identifikasi Lokasi Hutan Rakyat dengan Drone	Kab. PPU <ul style="list-style-type: none"> • Desa Pemaaluan 	Pengidentifikasian pada Lokasi Hutan Rakyat Menggunakan drone	03 - 06 Juli 2024	Mengetahui Bagaimana Kondisi Lahan Hutan Rakyat

4	Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan	Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan Lahan	Kecamatan sepaku Kab. Penajam Paser Utara	Melakukan Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Tentara dan Polisi	05 - 09 Agustus 2024	Mengetahui Kondisi Hutan dan Lahan
5	Kegiatan Bimtek Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu	Sosialisasi Bimbingan	Kab. PPU <ul style="list-style-type: none"> Desa Argo 	Melakukan Sosialisasi	22 - 26 Juli 2024	Memahami Pengolahan Hasil

Tabel 3.2. Lanjutan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Prosedur Pelaksanaan	Waktu	Capaian
	UPTD KPHP Meratus	Teknik Kelompok Tani Madu Kelulut	mulyo	Bersama Kelompok Tani Madu Kelulut		Hutan Bukan Kayu untuk Madu Kelulut
6	Menghadiri Kegiatan MPA	Sosialisasi Peran MPA di wilayah Kerja KPHP Meratus	Kab. Kukar <ul style="list-style-type: none"> Bukit Bengkirai 	Menjadi Narasumber	13 - 16 Agustus 2024	Memahami Peran Kerja MPA
7	Pengecekan Bibit Hutan Rakyat dan Madu Kelulut	Pengecekan Bibit dan Madu Kelulut	Kab. Kukar <ul style="list-style-type: none"> Desa Bakungan 	Melakukan Pengecekan Bibit Hutan Rakyat dan Madu Kelulut Bersama Anggota KTH	10 - 12 Juli 2024	Mengetahui Kelayakan Bibit dan Madu Kelulut yang akan di gunakan Untuk Hutan Rakyat

Tabel 3. Matriks Kegiatan di UPTD KPHP Meratus

Sub Bagian	Kegiatan
<p>PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE), DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman, dan pengayaan 2. Pemantauan dan evaluasi 3. Pembangunan dan penghijauan lingkungan 4. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu 5. Patroli pengamanan hutan 6. Perlindungan dan pengendalian kebakaran
<p>PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi areal 2. Penyediaan jasa komunikasi 3. Pemeliharaan peralatan dan pengadaan mesin 4. Penyedia administrasi pelaksanaan tugas
<p>TATA USAHA (TU)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan absen harian dan recab absen 2. Penerimaan surat masuk 3. Administrasi

A. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat

Hutan rakyat merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menghasilkan kayu atau komoditas lain sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Musdi, dkk., 2020). Pelaksanaan kegiatan hutan rakyat yang dilakukan oleh UPTD KPHP Meratus adalah untuk Program HR tahun 2025 dengan tujuan luas areal ± 50 Ha. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan KTH dan HR di wilayah kerja UPTD KPHP Meratus yaitu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Identifikasi awal dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dari setiap desa di kecamatan Sepaku, apakah daerah tersebut memiliki areal yang bisa dibuatkan hutan rakyat dan juga areal tersebut harus berada di APL (Areal Penggunaan Lain).



Gambar 3. 1 Rapat pelaksanaan hutan rakyat.

(a) Staf berkumpul di ruang rapat dan (b)Penyampaian kegiatan dari pimpinan

B. Monitoring Lahan Kegiatan Hutan Rakyat

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi (Nasihi dan Hapsari, 2022). Monitoring yang dilaksanakan oleh UPTD KPHP Meratus adalah untuk melihat seberapa jauh perkembangan hutan rakyat yang telah dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya. Monitoring nya berupapengecekan lahan, hasil panen, tanaman yang mati, dan juga seberapa besar kontribusi kelompok tani hutan pada daerah tersebut. Monitoring dilakukan di daerah Kecamatan Sepaku (Maridan, Argo Mulyo, Sepaku, Riko, dan Wono Sari).



Gambar 3. (a) Hasil drone kegiatan identifikasi, dan

(b) Proses penerbangan drone

C. Identifikasi Pembuatan Hutan Rakyat dengan Drone di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Identifikasi menggunakan drone bertujuan untuk melihat luas hamparan lahan yang akan dijadikan hutan rakyat di daerah kecamatan Sepaku. Kemudian drone areal juga bertujuan untuk melihat jenis pohon/tanaman apa saja yang tumbuh di areal tersebut.



Gambar 3.3 Identifikasi hutan rakyat menggunakan drone.
(a) penyiapan alat identifikasi areal, dan (b) hasil pengambilan gambar dari drone

D. Patroli Pengamanan, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Patroli pengamanan, kebakaran hutan dan lahan bertujuan untuk survei areal kerja UPTD KPHP Meratus agar areal tersebut tetap berada dalam keamanan serta menghindari terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan hutan dan lahan. Patroli pengamanan dilaksanakan oleh perwakilan dari UPTD KPHP Meratus, Koramil, Polsek, dan Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Sepaku.



Gambar 3. 4 Patroli dan pengamanan kebakaran hutan dan lahan.

(a) foto bersama dengan anggota polsek (b) penetapan titik koordinat rawan kebakaran hutan, (c) foto bersama dengan anggota koramil (d) foto bersama di titik kebakaran

E. Kegiatan Bimtek Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu UPTD KPHP Meratus

Kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh UPTD KPHP Meratus adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok HHBK di kecamatan Sepaku. Kegiatan ini berisi tentang pemberian materi serta bermain game bersama.



Gambar 3.5. Kegiatan bimtek kelompok HHBK KPHP Meratus.

F. Menghadiri Kegiatan MPA

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari kelompok Masyarakat Peduli Api di kecamatan Sepaku. UPTD KPHP Meratus menghadiri kegiatan ini sebagai narasumber tentang peran penting MPA di wilayah areal kerja UPTD KPHP Meratus.



Gambar 3. 6 Menghadiri kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

(a) Foto bersama MPA kecamatan Sepaku,

(b) Foto bersama dengan Kepala MPA kecamatan Sepaku. Pengecekan

Bibit Hutan Rakyat dan Madu Kelulut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek bibit-bibit yang sudah siap tanam dan menyisihkan bibit yang kurang baik agar bibit yang akan di tanam adalah bibit unggul dan siap tumbuh. Kemudian pengecekan madu kelulut juga dilakukan dalam rangka melihat seberapa jauh perkembangan ternak madu kelulut.



Gambar 3. 7 Pengecekan bibit hutan rakyat dan madu kelulut.

- (a) Pengecekan ternak lebah madu kelulut milik Kelompok Tani Hutan (KTH),
(b) Pengecekan bibit untuk huta rakyat. Pengecekan Lahan dan Bibit Hutan Rakyat, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek bibit-bibit yang sudah siap untuk tanam lalu menyisihkan bibit yang kurang baik agar bibit yang akan di tanam adalah bibit unggul dan siap tumbuh, lalu melakukan pengecekan terhadap lahan yang akan di tanami dengan bibit, dan mengganti bibit yang

sudah mati atau kurang baik pertumbuhannya (Penyulaman tanaman).

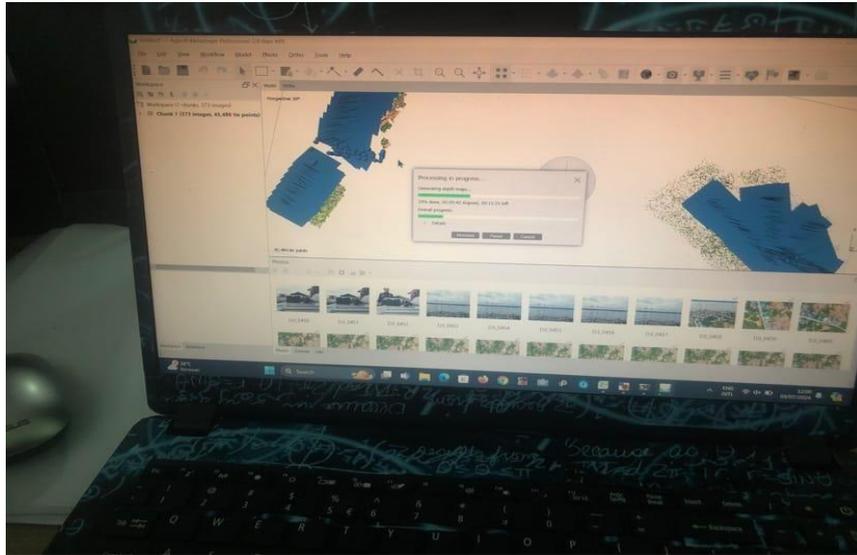


Gambar 3. 8 Mengecek lahan dan bibit unggul untuk hutan rakyat.

(a) Mengecek kelayakan bibit yang akan di gunakan untuk hutan rakyat, dan(b) pengecekan lahan yang akan di tanami bibit dan melakukan penyulaman tanaman.

G. Pembuatan Laporan dan Pemetaan Hasil Drone

Pembuatan laporan hasil drone adalah untuk melihat luas areal dalam bentuk peta, serta untuk digunakan sebagai bukti bahwa kegiatan identifikasi awal pada areal-areal yang sudah ditentukan itu benar-benar dilaksanakan.



Gambar 3. 9 Pembuatan laporan hasil dari drone.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari kegiatan PKL di UPTD KPHP Meratus adalah:

1. Setelah melaksanakan kegiatan PKL mahasiswa mampu memahami sistem pengelolaan hutan di wilayah KPHP Meratus.
2. Mahasiswa mampu memperdalam pengetahuan dalam upaya pemanfaatan sumber daya hutan dengan melakukan kegiatan penanaman, pembibitan dan pengelolaan hutan di KPHP Meratus.
3. Kelompok mahasiswa PKL mampu menyampaikan tanggung jawab pada saat kegiatan praktik kerja lapangan.
4. Setelah melibatkan kegiatan di UPTD KPHP Meratus mahasiswa mendapatkan pengalaman dan hal-hal baru dalam mengenali dunia kerja.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat di berikan adalah:

Pihak mitra PKL sebaiknya:

1. Memperbanyak kegiatan lapangan dan
2. Memberikan kebebasan mahasiswa untuk belajar lebih banyak.
3. Fakultas kehutanan dapat memperluas jaringan kerja sama dalam hal penerimaan mahasiswa PKL dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta terkait bidang studi kehutanan, sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam mencari tempat PKL
4. Fakultas kehutanan memberikan mahasiswa PKL bekal tentang moral dan etika kerja, sehingga pada waktu pelaksanaan PKL dapat membawa nama untuk universitas

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, N. (2018). Strategi Percepatan Pengembangan UPTD KPHP model Mratus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. *Paradigma*, 7(3), 131–141
- Miftahul Ulfah (2014) Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus Balikpapan.
- Musdi, Hardjanto, Sundawati. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 2020, 2.2: 1-8.
- Nasihi, Hapsari. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesia Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 2022, 1.1: 77-88

Lampiran1 Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)



(a) Foto bersama di Kelurahan Sepaku, (b) Foto bersama Anggota PKL, (c) Foto bersama Kelurahan Riko, (d) Foto Bersama Kelurahan Argomulyo, (e), (f), (g), (h) Foto bersama dengan Ibu Karyati dan Mitra

